KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PPPK Jadi penuh waktu di 2027, komisi X harap pelayanan publik makin profesional
Tanggal : Senin, 09 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

PPPK Jadi Penuh Waktu Di 2027

Komisi X Harap Pelayanan Publik Makin Profesional

Senayan menyambut baik keputusan Pemerintah meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu bagi berbagai profesi mulai Januari 2027.

ANGGOTA Komisi X DPR Reni Astuti menilai, keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi para tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini menantikan kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan atas pengabdian mereka selama ini. "Jadi keputusan Pemerintah ini menjawab harapan banyak pihak," kata Reni di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Sebelumnya, berdasarkan keputusan yang disampaikan Pemerintah bersama DPR pada Jumat (06/11/2026), peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, setelah beberapa kali melakukan perhitungan, maka hari ini diputuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan ini termasuk lintas profesi, seperti dosen, damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain.

"Para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026)

Reni melanjutkan, kebijakan peningkatan status PPPK paruh waktu tidak hanya dilihat dari sisi tenaga guru, tetapi juga mesti memberikan perhatian kepada tenaga kependidikan serta tenaga teknis lainnya yang selama ini turut menopang pelayanan publik. Ada operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga teknis di sektor kesehatan, serta berbagai tenaga pelaksana lainnya yang juga memiliki kontribusi penting.

"Mereka semua perlu mendapatkan perhatian dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku," tegas politisi PKS ini.

Reni berharap, perluasan kebijakan lintas profesi tersebut dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian secara lebih menyeluruh dan berkeadilan. Karena itu, keputusan tersebut segera ditindaklanjuti melalui regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Sehingga, para pegawai yang masuk dalam cakupan kebijakan dapat memperoleh kepastian tanpa harus menunggu terlalu lama.

Dia mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama dalam pendataan, pemetaan kebutuhan tenaga dan kesiapan anggaran. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan itu berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, kepastian status kepegawaian akan memberikan semangat dan motivasi bagi para tenaga pelayanan publik untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kebijakan ini adalah harapan banyak masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepastian status dan masa depan pekerjaannya.

"Mari kita kawal bersama agar keputusan baik ini benar-benar terealisasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi seluruh tenaga yang berhak," harap legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan keadilan bagi para tenaga yang telah mengabdi selama bertahun-tahun harus terus dikawal melalui sinergi antara Pemerintah, DPR, Pemda, dan masyarakat. "Langkah ini menjadi awal penyelesaian berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini dihadapi para tenaga PPPK paruh waktu," harap dia.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menambahkan, kesepakatan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini berkontribusi penuh dalam penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai daerah. Karena itu, kenaikan status menjadi PPPK penuh waktu tidak boleh dipandang sebatas perubahan administrasi di atas kertas.

Pemda dan instansi terkait, kata Khozin, dituntut untuk memastikan perubahan status ini berbanding lurus dengan peningkatan profesionalisme, disiplin, dan produktivitas kerja aparatur. ■ TIF